

BAB II

NATO SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL DAN RELEVANSINYA PASCA PERANG DINGIN

A. Sejarah Awal Berdirinya NATO

Berakhirnya Perang Dunia II meninggalkan Eropa dalam kehancuran massal. Tidak hanya menimbulkan jatuhnya korban jiwa, perang yang terjadi dalam kurun enam tahun ini menimbulkan kerusakan hampir dalam seluruh aspek. Kerusakan infrastruktur, perekonomian negara yang melemah, pemerintahan yang tidak stabil, rusaknya tatanan sosial merupakan dampak yang ditimbulkan oleh Perang Dunia II.

Adalah Inggris dan Prancis yang pertama kali merumuskan perlunya aliansi keamanan di Eropa. Kekhawatiran akan remiliterisasi Jerman dan tidak tertariknya AS dengan kondisi politik di Eropa mendorong keduanya untuk menandatangani perjanjian Dunkirk pada Maret 1947.²¹ Dalam perjanjian ini, baik Inggris maupun Prancis bekerja sama untuk menciptakan aliansi berdasarkan keamanan bersama dan asas timbal balik. Bergabungnya Belanda, Belgia dan Luksemburg memperluas perjanjian Dunkirk, dan pada bulan Maret 1948, kelima negara menandatangani perjanjian Brussel. Perjanjian ini melahirkan *Western Union Defence Organization* (WUDO) lima bulan setelahnya.²²

Di samping kelima negara anggota WUDO, negara lain yang berkontribusi besar terhadap kelahiran NATO adalah AS. Sempat dikhawatirkan akan kembali menerapkan politik isolasionisme, AS mampu membuktikan komitmennya dalam keterlibatan internasional, khususnya di Eropa. Dua tahun

²¹ Andrew Moran, "The North Atlantic Treaty Organization: Continuity and change" dalam Peter Hough, et.al. (2015). *International Security Studies: Theory and Practice*, New York: Routledge, p. 308

²² *Ibid.*

sebelum Perang Dunia II berakhir, senat AS meloloskan resolusi yang mendukung pendirian organisasi menyerupai PBB. AS juga menjadi tuan rumah di mana Piagam PBB dirumuskan, tepatnya di kota San Francisco.²³ Politik pembendungan ideologi komunisme atau *containment policy* yang digagas George Kennan berpengaruh terhadap lahirnya sejumlah kebijakan, seperti Doktrin Truman dan *Marshall Plan*.

Seiring berjalannya waktu, remilitarisasi Jerman yang ditakutkan banyak pihak tidak terjadi. Ancaman muncul justru berasal dari Uni Soviet. Berada dalam pihak Sekutu selama Perang Dunia II, negara berhaluan komunis ini berusaha menyebarkan pengaruhnya dengan menguasai negara-negara di kawasan Eropa Timur dan Tengah. Beberapa di antaranya seperti kudeta yang dilancarkan di Cekoslovakia dan blokade terhadap Berlin Barat. Menghadapi ancaman yang semakin besar, pada 4 April 1949 kelima anggota WUDO bertemu dengan AS, Kanada, Portugal, Italia, Norwegia, Denmark, dan Islandia, untuk selanjutnya menandatangani Traktat Atlantik Utara. Traktat inilah yang mendasari berdirinya NATO, sekaligus mengakhiri WUDO dua tahun kemudian.²⁴

B. Peran NATO Selama Perang Dingin

Seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, pendirian NATO tidak hanya ditujukan untuk menangkal Uni Soviet, melainkan mencegah kemungkinan bangkitnya militer Jerman dan mempertahankan Amerika di benua Eropa. Oleh Lord Ismay, sekretaris jenderal pertama NATO, pendirian NATO merupakan upaya “*to keep the Soviet Union out, the Americans in, and the Germans down.*”²⁵

²³ Brian J. Collins. (2011). *NATO: A Guide to the Issues*, Santa Barbara: Praeger, p. 12-13

²⁴ Probo Darono Yakti. (2016). “Kebutuhan Uni Eropa terhadap Institusi Keamanan: Peranan NATO di Era Kontemporer”. *Hubungan Internasional*, Tahun IX, p. 81-98

²⁵ Moran, *op.cit.*

Selama empat puluh tahun NATO berperan besar dalam mencegah perang terbuka dengan Uni Soviet, salah satunya karena doktrin pertahanan kolektif yang dianut negara-negara anggota NATO sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Traktat Atlantik Utara:

“Seluruh anggota menyetujui bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu anggota atau lebih di Eropa maupun Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota, dan menyetujui, jika serangan bersenjata seperti itu terjadi, setiap anggota, dengan menggunakan hak untuk mempertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama seperti yang tertuang dalam Pasal 51 Piagam PBB, akan membantu anggota yang diserang dengan tindakan serupa, baik sendiri maupun bersama-sama, termasuk penggunaan kekuatan bersenjata, jika dirasa perlu, untuk mengembalikan dan menjaga keamanan wilayah Atlantik Utara.”²⁶

Bagi sebuah organisasi, adalah hal biasa dalam menghadapi persoalan rumit di awal pendiriannya. Termasuk NATO yang menghadapi setidaknya dua persoalan di awal keberadaannya. Hingga tahun 1950, NATO belum memiliki struktur yang jelas untuk mengoordinasikan tindakannya.²⁷ Ketika Traktat Washington disepakati para pesertanya, hanya ada satu struktur dalam NATO: Dewan Atlantik Utara (NAC) yang dibentuk berdasarkan Pasal 9. Itu pun terbatas dalam dimensi politik. Keberhasilan Uni Soviet dalam uji coba bom atom pertamanya di tahun 1949 dan pecahnya Perang Korea membuat NATO harus bergerak cepat dalam membentuk struktur-struktur lainnya, seperti Sekretaris Jenderal dan Komite Militer yang kemudian dikombinasikan ke dalam

²⁶ NATO, *The North Atlantic Treaty (1949)*, Article 5

²⁷ Moran, *op.cit.*, p. 309

struktur komando dan perencanaan militer terpadu.²⁸ Struktur baru ini kelak dinamakan *Allied Command Operations* (ACO) dan dipimpin oleh *Supreme Allied Commander Europe* (SACEUR) yang selalu diisi oleh jenderal-jenderal AS.

Upaya integrasi Jerman Barat yang dilakukan AS menjadi masalah lain yang dihadapi NATO. Sebagai konsekuensi atas kekalahannya dalam Perang Dunia II, Jerman harus menandatangani Perjanjian Potsdam di mana selain didemiliterisasi, wilayah Jerman dibagi menjadi empat bagian. AS, Inggris dan Prancis mendapat tiga wilayah di sebelah barat dan Uni Soviet mendapat bagian di sebelah timur. Baik AS dan sekutunya bersama Uni Soviet menginginkan Jerman yang bersatu, namun terhalang oleh perbedaan ideologi di antara keduanya. Ketika Perang Dingin semakin memanas, AS berupaya melakukan remiliterisasi Jerman dengan harapan mencegah perluasan komunisme jauh ke barat Eropa. Rencana ini mendapatkan penolakan dari negara-negara yang dulunya pernah mengalami penjajahan Jerman, termasuk Prancis yang tidak ingin musuh lamanya dipersenjatai kembali.²⁹ Pada 5 Mei 1955 AS, Inggris dan Prancis resmi menarik militernya dari Jerman Barat yang selanjutnya menjadi negara merdeka dan bergabung dengan NATO empat hari berikutnya. Jerman Barat akhirnya diperbolehkan membangun militernya sendiri, namun masih dalam angka yang kecil serta dalam pengawasan NATO dan *Western European Union* (WEU).

Tidak ingin ketinggalan, Uni Soviet ikut mendirikan aliansi serupa dengan memasukkan Albania, Polandia, Rumania, Hongaria, Jerman Timur, Bulgaria, dan Cekoslovakia sebagai anggotanya. *Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance* atau Pakta Warsawa resmi didirikan sebagai aliansi tandingan NATO.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ History.com. *West Germany joins NATO*, dikutip dari <http://www.history.com/this-day-in-history/west-germany-joins-nato> (diakses pada 14 Januari 2018)

Dalam perspektif kaum realis, pendirian Pakta Warsawa merupakan upaya perimbangan kekuatan di mana Uni Soviet berupaya mengimbangi NATO dengan AS dan ideologi kapitalismenya. Uni Soviet menyadari akan kekuatannya yang tidak sama jika harus menghadapi negara-negara NATO sendirian. NATO akan leluasa untuk memperluas pengaruhnya tanpa bisa ditangkal Uni Soviet. Sedangkan Uni Soviet yang berupaya mempertahankan negara satelitnya harus bersiap dengan doktrin pertahanan kolektif yang sewaktu-waktu digunakan NATO. Dengan Pakta Warsawa, Uni Soviet memiliki kuasa penuh atas negara-negara satelitnya serta menangkal ekspansi NATO di timur Eropa.

C. Relevansi NATO Pasca Perang Dingin

Stephen Walt mengemukakan alasan utama suatu negara untuk membentuk kerjasama atau aliansi yaitu sebagai upaya dalam menghadapi ancaman yang lebih besar dan kuat dari negara lain.³⁰ Keberlangsungan aliansi juga dipengaruhi oleh ancaman tersebut. Dengan kata lain, apabila ancaman tersebut hilang maka kerjasama tersebut akan bubar dengan sendirinya.

Begitu pula yang dialami NATO. Perubahan situasi politik internasional pasca keruntuhan Tembok Berlin menyebabkan banyak kalangan menilai NATO telah kehilangan relevansinya. Diawali ketika aliansi militer milik Uni Soviet, Pakta Warsawa, mengalami keruntuhan di tahun 1991. Gelombang protes anti Soviet dan anti komunisme yang terjadi di negara-negara kawasan Eropa Timur menjadi salah satu faktor runtuhnya aliansi yang sudah berdiri selama 36 tahun ini. Sejumlah negara anggotanya mulai menarik diri, seperti Polandia, Ceko, Slovakia dan Jerman Timur yang kemudian bergabung dengan Jerman Barat. Masih dalam tahun yang sama, Uni Soviet menyusul bubar akibat kondisi politik dan ekonomi dalam negeri yang semakin kacau. Dengan

³⁰ Sangit Sarita Dwivedi. (2012). "Alliances in International Relations Theory". *International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research*, 1 (8), p. 230

bubarnya Uni Soviet, praktis NATO sudah tidak memiliki alasan yang mendukung eksistensinya. AS telah menjadi kekuatan besar yang berperan aktif dalam menyebarkan paham liberalisme dan demokrasi tidak hanya di Eropa melainkan ke seluruh dunia. Jerman kembali bersatu, dan tetap menjadi anggota NATO dikarenakan Jerman Barat telah bergabung sejak tahun 1955.

Sejumlah akademisi ikut memberikan suara kritis terhadap eksistensi NATO pasca Perang Dingin, misalnya John Mearsheimer dan Kenneth Waltz.³¹ Dalam tulisannya, Mearsheimer menyebutkan NATO akan kehilangan fungsinya sebagai sebuah aliansi meskipun secara fisik masih ada, seperti markas besar atau struktur organisasi. Mearsheimer menambahkan agresivitas Jerman menjadi satu-satunya alasan yang dapat digunakan NATO untuk mempertahankan eksistensinya setelah Perang Dingin berakhir.³² Sedangkan bagi Waltz, keberadaan NATO dalam jangka panjang hanya akan menyebabkan negara-negara Eropa—yang tidak lagi terancam jika dilihat dari sudut pandang keamanan—merasa terganggu dengan keberadaan militer AS.³³ Waltz menambahkan, penggunaan kekuatan militer akan menyulitkan AS dalam menjalin hubungan dengan negara lain di tengah-tengah struktur internasional yang saat ini didominasi aspek politik dan ekonomi.

Namun hal itu tidak terjadi. NATO masih bertahan hingga saat ini. Kemudian apa yang menyebabkan NATO mampu mempertahankan eksistensinya?

Dengan melihat kembali pendapat Walt, diketahui bahwa kelahiran aliansi dipengaruhi oleh ada tidaknya suatu ancaman yang berpengaruh terhadap eksistensi aliansi tersebut. Sehingga

³¹ Moran, *op.cit.*, p. 310

³² John Mearsheimer. (1990). "Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War", *International Security*, 15 (1), p. 5-6

³³ Kenneth Waltz. (1993). "The Emerging Structure of International Politics", *International Security*, 18 (2), p. 75

dapat disimpulkan bahwa NATO harus memiliki ancaman yang dapat menjustifikasi eksistensinya. Untuk menjaga eksistensinya dan tetap relevan di tengah-tengah perubahan kondisi keamanan pasca Perang Dingin, NATO melakukan langkah-langkah seperti yang dijelaskan di bawah ini.

1. Declaration on a Transformed North Atlantic Alliance

Setahun setelah peristiwa Tembok Berlin, pada 5-6 Juli 1990 NATO mengadakan konferensi di London. Tujuannya tidak lain untuk menentukan masa depan NATO, mengingat situasi yang terjadi menjelang akhir Perang Dingin. Dalam konferensi yang berlangsung selama dua hari ini, seluruh perwakilan negara Aliansi berhasil merumuskan *Declaration on a Transformed North Atlantic Alliance*, atau Deklarasi London yang memiliki sejumlah poin penting. *Pertama*, NATO akan mempertahankan komitmennya sebagai aliansi pertahanan. Lebih spesifik dari itu, NATO tidak lagi menganggap persoalan keamanan dan stabilitas terbatas pada dimensi militer, tetapi melibatkan dimensi politik seperti demokrasi, pengakuan hak-hak individu, dan upaya penyelesaian konflik secara damai. Pernyataan ini didasarkan Pasal 2 Traktat Atlantik Utara yang berbunyi:

Seluruh anggota akan berkontribusi terhadap pengembangan hubungan internasional yang ramah dan damai dengan memperkuat institusi yang ada pada masing-masing negara, dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip yang mendasari terbentuknya prinsip tersebut, serta dengan mempromosikan stabilitas dan kesejahteraan. Seluruh anggota juga akan menghilangkan konflik yang ada dalam kebijakan ekonomi mereka dan mendorong terbentuknya kerjasama ekonomi antara masing-masing

negara anggota ataupun dengan negara lainnya.³⁴

Kedua, berkaitan dengan hubungan dengan negara-negara bekas Pakta Warsawa, NATO mendorong masing-masing anggotanya untuk tidak lagi memosisikan diri sebagai musuh dan berjanji untuk menahan diri terhadap penggunaan kekerasan terhadap kemerdekaan politik negara mana pun. Lebih lanjut, NATO mengajak Uni Soviet beserta negara Eropa Tengah dan Timur lainnya untuk menjalin hubungan diplomatik reguler dengan NATO. *Ketiga*, negara-negara anggota NATO mendorong adanya dialog dalam bidang militer antara Barat-Timur, seperti membentuk kesepakatan mengenai *Open Skies* dan pengurangan serta pembatasan angkatan bersenjata konvensional di Eropa, yang dikenal sebagai *Treaty on Conventional Armed Forces in Europe* (CFE).

Keempat, NATO akan mengubah struktur militer dan strategi dengan menerapkan elemen-elemen baru: pengerahan pasukan dalam kuantitas yang lebih kecil dan terstruktur, menurunkan tingkat kesiapan tentara aktifnya, mengurangi angka latihan dan mengandalkan kemampuan untuk membangun kekuatan yang lebih besar. *Kelima*, NATO berkomitmen dalam mengurangi ketergantungannya terhadap senjata nuklir dengan membatasi jumlah senjata yang dimiliki. Walau demikian, senjata nuklir masih menjadi komponen inti dari kekuatan NATO yang hanya digunakan untuk pertahanan diri. *Keenam*, NATO mendukung konferensi yang diselenggarakan *Conference on Security and Cooperation in Europe* (CSCE)³⁵ dan merekomendasikan pembentukan program konsultasi secara reguler di tingkat kepala negara dan pemerintahan setahun sekali, mengadakan konferensi dua tahunan untuk meninjau pencapaian yang diperoleh

³⁴ NATO, *The North Atlantic Treaty (1949)*, Article 2.

³⁵ CSCE berubah menjadi OSCE pada tahun 1995.

untuk mewujudkan Eropa yang utuh dan bebas, pembentukan sekretariat OSCE yang bertugas sebagai koordinator pertemuan dan konferensi, pembentukan mekanisme untuk memonitor proses pemilu di seluruh negara anggota OSCE (*Office for Free Elections*), pembentukan Pusat Pencegahan Konflik (*OSCE Center for the Prevention of Conflict*), serta pembentukan Majelis Parlemen OSCE.³⁶

2. Redefinisi Ancaman terhadap Keamanan melalui Alliance's Strategic Concept Tahun 1991 dan 1999

Pada November 1991, NATO kembali menyelenggarakan konferensi di tingkat kepala negara dan pemerintahan di Roma. Dalam konferensi ini, NATO berhasil mengadopsi *Alliance's Strategic Concept* tahun 1991. Apabila ditilik kembali, tidak ada yang membedakan Deklarasi London dengan *Alliance's Strategic Concept*. Hanya saja yang menjadi perhatian utama dalam konsep baru ini yaitu NATO memperbarui definisinya tentang ancaman terhadap keamanan aliansi, di mana tidak lagi terbatas pada Uni Soviet melainkan sudah diperluas hingga mencakup dimensi ekonomi dan sosial, sebagaimana yang ditemukan di negara-negara Eropa Tengah dan Timur berupa konflik etnis dan sengketa wilayah.³⁷

1991 Alliance's Strategic Concept turut menyebutkan proliferasi rudal balistik dan senjata pemusnah massal (WMD), terganggunya arus sumber daya vital, tindakan terorisme merupakan bentuk-bentuk ancaman baru yang harus dihadapi NATO. Khusus

³⁶ NATO. *Declaration on a Transformed North Atlantic Alliance*, dikutip dari https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_23693.htm (diakses pada 18 Januari 2018)

³⁷ NATO. *The Alliance's New Strategic Concept*, dikutip dari https://www.nato.int/cps/ua/natohq/official_texts_23847.htm (diakses pada 21 Januari 2018)

mengenai proliferasi WMD dan rudal balistik, NATO menyebutkan Mediterania Selatan dan Timur Tengah sebagai kawasan yang berpengaruh terhadap keberlangsungan aliansi dengan mempertimbangkan kedekatan secara geografis antara Eropa dan kedua kawasan tersebut.

Dengan hadirnya berbagai ancaman baru, kekuatan militer tidak lagi menjadi satu-satunya langkah untuk menciptakan keamanan bagi NATO dan anggotanya. Oleh karenanya, NATO menerapkan strategi baru dengan membangun dialog dan kerjasama, serta meningkatkan kemampuan dalam manajemen krisis dan pencegahan konflik dengan melibatkan aktor-aktor lain seperti OSCE, Uni Eropa, WEU, dan PBB.

Dalam Konferensi Washington April 1999, *Alliance's Strategic Concept* kembali diperluas. Namun perluasan kali ini ditujukan kepada lingkup aktivitas di mana NATO tidak lagi membatasi perannya sebatas konteks pertahanan diri, namun akan memainkan peran yang lebih aktif dalam mengatasi isu-isu pasca Perang Dingin.³⁸ Ini dapat dilihat dari keterlibatan NATO dalam upaya resolusi konflik di negara-negara Balkan seperti Bosnia dan Herzegovina, serta Kosovo.

1999 Alliance's Strategic Concept merupakan jawaban atas perdebatan yang terjadi di penghujung abad ke-20 mengenai eksistensi NATO. Dihadapkan pada pilihan "*out-of-area*" atau "*out-of-business*", tentu bukan menjadi pilihan apabila negara-negara Aliansi berpaling dari organisasi yang telah melindungi mereka dari ancaman

³⁸ Stratfor. *NATO: An Inadequate Strategic Concept?*, dikutip dari <https://worldview.stratfor.com/article/nato-inadequate-strategic-concept> (diakses pada 21 Januari 2018)

Uni Soviet selama hampir setengah abad.³⁹ Apalagi, isu-isu yang menjadi perhatian NATO sudah diperluas, dan beberapa di antaranya secara geografis berdekatan dengan kawasan Euro-Atlantik. Inilah alasan yang mendorong NATO untuk memperlebar jangkauan operasinya dari kawasan Balkan, dan di kemudian hari, hingga Timur Tengah dan Afghanistan.

3. Menjalinkan Kerjasama dengan Negara-negara Kawasan Eropa-Atlantik dan Timur Tengah

Untuk meningkatkan rasa saling percaya di antara negara-negara Eropa dan mencegah munculnya krisis atau konflik yang mempengaruhi keamanan negara-negara Aliansi, dibentuklah berbagai kerangka kerjasama seperti *North Atlantic Cooperation Council*, *Partnership for Peace*, dan *Mediterranean Dialogue*.

a. *North Atlantic Cooperation Council dan Euro-Atlantic Partnership Council*

Pada 20 Desember 1991, seluruh menteri luar negeri dari negara-negara Aliansi membentuk *North Atlantic Cooperation Council* (NACC) yang ditujukan sebagai wadah untuk membahas isu keamanan bersama Uni Soviet beserta negara-negara Eropa Timur dan Tengah. Pembentukan NACC merupakan tindak lanjut dari komitmen NATO untuk membangun kerjasama serta menghilangkan perselisihan antara blok Barat dan Timur, yang didefinisikan melalui Deklarasi London sebagai “*extending the hand of friendship*.”⁴⁰

³⁹ William Tuohy. *NATO After the Cold War: It's 'Out of Area or Out of Business'*, dikutip dari http://articles.latimes.com/1993-08-13/news/mn-23409_1_cold-war (diakses pada 21 Januari 2018)

⁴⁰ NATO. *North Atlantic Cooperation Council (NACC) (Archived)*, dikutip dari https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_69344.htm (diakses pada 31 Januari 2018)

Setelah mengadakan kunjungan kenegaraan, bertukar pandangan terhadap keamanan dan isu-isu lain, mengadakan kontak militer secara intensif dan pertukaran ahli di berbagai bidang, baik NATO dan negara-negara Eropa Tengah dan Timur rupanya masih menginginkan terjalinnya hubungan yang lebih intensif dan dalam cakupan yang lebih luas. Oleh karenanya, melalui Deklarasi Roma NATO mengusulkan pertemuan tahunan di tingkat menteri yang dinamakan NACC.

Pada awal pendiriannya, ada 27 negara yang tergabung dalam NACC. Jumlah ini meningkat seiring bergabungnya Georgia, Azerbaijan dan negara-negara Asia Tengah di tahun 1992, menjadikan total anggota NACC sebanyak 40 negara.⁴¹ Adapun isu-isu yang menjadi pembahasan dalam NACC seperti isu keamanan peninggalan Perang Dingin, dalam hal ini penarikan pasukan Rusia dari negara-negara Baltik dan konflik regional yang terjadi di bekas negara Uni Soviet dan Yugoslavia. Di samping itu, NACC juga menyediakan kerjasama dalam dimensi politik maupun militer.

Dengan diadakannya konferensi NACC di Sintra, Portugal pada Mei 1997, NACC bertransformasi menjadi *Euro-Atlantic Partnership Council* (EAPC). Seluruh aktivitas yang dilakukan dalam kerangka NACC beralih ke dalam kerangka baru, dengan menambahkan aspek-aspek kontemporer seperti terorisme dan pengontrolan senjata api. Dalam perkembangannya, EAPC memegang peran penting sebagai wadah konsultasi dan perencanaan terkait upaya resolusi konflik di Kosovo tahun 1999, dengan

⁴¹ Nuclear Threat Initiative. *EURO-ATLANTIC PARTNERSHIP COUNCIL (EAPC)*, dikutip dari <http://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/euro-atlantic-partnership-council-eapc/> (diakses pada 31 Januari 2018)

mengadakan pertemuan luar biasa untuk merencanakan kemungkinan-kemungkinan opsi militer di Kosovo.⁴²

b. Partnership for Peace

Keberhasilan NACC mendorong NATO untuk membentuk berbagai kerangka kerjasama baru. Salah satunya yakni *Partnership for Peace* (PfP). Les Aspin menjadi orang pertama yang mengusulkan pembentukan PfP, dengan mempertimbangkan keinginan dalam memfasilitasi negara-negara Eropa Timur dan Tengah terkait keikutsertaan dalam NATO, namun di sisi lain dihadapkan pada kekhawatiran akan Rusia yang merasa terpinggirkan dan terancam dengan perluasan NATO.

Melalui undangan yang disampaikan dalam Konferensi Brussel, 10-11 Juni 1994, secara resmi NATO mengumumkan terbentuknya PfP. NATO mengajak negara-negara anggota EAPC dan OSCE yang berminat dalam meningkatkan kerjasama militernya, namun tidak atau belum ingin menjadi anggota NATO. Sebagai gantinya, NATO tidak memberikan jaminan keamanan apalagi keanggotaan NATO secara penuh pada negara anggota PfP. Akan tetapi anggota PfP dapat berkonsultasi jika integritas teritorial, independensi politik, atau keamanan mereka terancam.⁴³ Hal ini memberi dampak positif bagi NATO. Selain tidak perlu mengkhawatirkan rusaknya kerjasama yang dibangun dengan Rusia, NATO akan lebih mudah menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Eropa Timur dan Tengah.

Program PfP dijalankan berdasarkan *Framework Document* yang ditandatangani oleh setiap negara yang bergabung di dalamnya. Dalam dokumen itu terdapat

⁴² *Ibid.*

⁴³ Yüksel İnan dan İslam Yusuf. (1999). "Partnership For Peace". *Perceptions*, IV (2), p. 3

syarat-syarat yang harus seperti menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip hukum internasional, memenuhi kewajiban-kewajiban yang ada dalam Piagam PBB⁴⁴, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Akta Helsinki dan perjanjian internasional terkait pengendalian dan pelucutan senjata.⁴⁵ Selain itu, di dalam dokumen tersebut juga memuat komitmen khusus yang bertujuan untuk mempromosikan transparansi dalam bidang perencanaan dan penganggaran pertahanan nasional, membangun kendali atas angkatan bersenjata secara demokratis, dan mengembangkan kapasitas untuk dapat berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian bersama NATO.⁴⁶

c. Mediterranean Dialogue

Mediterranean Dialogue (MD) diinisiasi oleh NAC untuk membantu menciptakan keamanan dan stabilitas di kawasan Mediterania, serta menghilangkan kesalahpahaman tentang kebijakan dan tujuan NATO di antara negara-negara Mediterania. Inisiasi MD didasarkan kepada Konsep Strategis NATO 1991, di mana NATO menganggap kawasan Mediterania sebagai kawasan yang mempengaruhi keamanan aliansi di Eropa.

Mediterranean Dialogue dibentuk berdasarkan pada prinsip-prinsip seperti perkembangan dialog didasarkan pada kepemilikan bersama dengan menghormati situasi regional, budaya, dan politik negara mitra; dialog yang bersifat progresif dalam

⁴⁴ Menahan diri dari penggunaan kekerasan terhadap negara lain, penghormatan atas batas-batas negara yang ada, dan penyelesaian konflik secara damai.

⁴⁵ NATO's Public Diplomacy Division. (2006). *NATO Handbook*, Brussel: NATO's Public Diplomacy Division, p. 197-201

⁴⁶ *Ibid.*

partisipasi dan substansi, memungkinkan berkembangnya jumlah mitra dialog dan substansi yang dibahas dalam dialog; seluruh mitra di Mediterania memiliki kesempatan yang sama untuk menjalin diskusi dan kerjasama. Negara anggota dialog bebas memilih seberapa besar tingkat dan intensitas partisipasi mereka; keberadaan Dialog dimaksudkan untuk melengkapi upaya internasional lainnya seperti *Euro-Mediterranean Partnership* yang diinisiasi Uni Eropa dan *Mediterranean Initiative* yang diinisiasi OSCE.⁴⁷

Mediterranean Dialogue terdiri dari dimensi politik dan praktis. Dimensi politik dilakukan dengan mengadakan pertemuan bilateral dengan melibatkan negara-negara Dialog individual dan negara-negara anggota NATO serta pertemuan multilateral yang melibatkan seluruh peserta Dialog dalam pertemuan gabungan dengan seluruh negara-negara anggota NATO. Dialog politik juga meliputi konferensi multilateral di tingkat duta besar dan kunjungan oleh pejabat senior. Dalam dimensi praktis, kerjasama dilakukan dengan menyusun Program Kerja Tahunan seperti seminar, *workshop* dan aktivitas lainnya yang mencakup hingga 21 aspek seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen krisis, kebijakan dan strategi pertahanan hingga proliferasi WMD. Untuk kerjasama praktis dalam dimensi militer dilakukan dengan mengundang negara-negara Dialog dalam latihan militer NATO, menjadi tuan rumah dalam *port visit* yang dilakukan *NATO's Standing Naval Forces*, hingga kontribusi langsung sejumlah negara partisipan dalam *Implementation Force* (IFOR) dan *Stabilisation Force* (SFOR) di Bosnia, serta *Kosovo Force* (KFOR).

⁴⁷ *Ibid.*, p. 230-234